

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan gambaran dari kesejahteraan masyarakat. Karena tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang ingin bekerja. Karena tenaga kerja adalah komponen produksi dalam produksi barang dan jasa, tenaga kerja sangat penting bagi suatu wilayah atau negara (Hall & Krueger, 2016)

Tujuan utama dari tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan adalah untuk mendapatkan upah. Upah merupakan pembayaran atas jasa material yang diberikan oleh pekerja kepada pemberi kerja (Sukirno, 2005). Upah merupakan faktor penting dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha karena upah mencerminkan nilai ekonomi dari pekerjaan yang dilakukan. Selain sebagai sumber pendapatan bagi pekerja, upah juga dapat mempengaruhi produktivitas, motivasi, dan kepuasan kerja. Perubahan tingkat upah juga dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian dan distribusi pendapatan di masyarakat. Oleh karena itu, analisis dan kebijakan terkait pengupahan menjadi penting dalam konteks pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Upah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk penawaran dan permintaan pasar tenaga kerja, keterampilan kerja, kebijakan pemerintah, dan tingkat pendidikan. Pendidikan adalah investasi untuk mendapatkan upah yang lebih baik. Dalam teori sumber daya manusia, pendidikan dapat meningkatkan produktivitas dan upah (Borjas, 2016). Dengan mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi maka seseorang akan memperoleh pekerjaan yang lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih rendah. Sehingga menjadikan pendidikan sebagai faktor terpenting yang dapat mempengaruhi upah. Pada dasarnya upah yang diperoleh oleh tenaga kerja dipengaruhi oleh pencapaian dan pengalaman kerja yang telah ditempuh. Semakin

tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh individu maka semakin tinggi juga upah yang akan diterima.

Berdasarkan survei pada tahun 2023, penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi hanya 10,15%. Sedangkan yang pendidikan terakhirnya SMA/ sederajat sebesar 30,22%, kemudian SMP/ sederajat 22,74%, dan SD/ sederajat 24,62%. Selain itu pada periode yang sama penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah pendidikan mencapai angka 12,26%. Berdasarkan hal ini persentase penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah lebih besar dari penduduk yang menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi (BPS, 2024).

Pendidikan yang tinggi merupakan gambaran dari kualitas dan potensi yang dimiliki oleh seseorang (Spence, 1973). Semakin tinggi pendidikan yang akan ditempuh maka akan semakin tinggi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan tersebut. Oleh karena itu pendidikan merupakan aspek terpenting bagi seorang individu untuk bersaing dengan individu lainnya dalam pasar tenaga kerja.

Tenaga kerja sangat penting untuk menentukan kemajuan atau kemunduran suatu negara, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, sehingga Indonesia memiliki lapangan pekerjaan yang cukup luas. Banyaknya lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah dan perusahaan swasta membuat lowongan kerja tersedia untuk berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari SD hingga sarjana. Tentu saja, mendapatkan gelar yang lebih tinggi akan menghasilkan upah yang lebih banyak. (Desanti & Ariusni, 2021).

Berdasarkan data survei pendidikan di Indonesia menunjukkan adanya disparitas yang cukup signifikan. Meskipun pendidikan diakui sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas hidup, namun persentase penduduk Indonesia yang berhasil menamatkan pendidikan tinggi masih tergolong rendah, yakni hanya 6,41%. Rinciannya, sebagian besar lulusan perguruan tinggi berada pada jenjang S1, sementara proporsi lulusan S2 dan S3 masih sangat kecil. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia (BPS, 2024).

Di sisi lain, data juga menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, dengan tamatan SLTA mendominasi. Namun, masih terdapat proporsi yang cukup besar pada penduduk yang belum memiliki ijazah SD atau bahkan tidak/belum pernah sekolah. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan pendidikan yang perlu menjadi perhatian serius. Disparitas pendidikan ini berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan, seperti kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan partisipasi dalam pembangunan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang komprehensif, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang, perluasan akses pendidikan, hingga penyediaan beasiswa dan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu (BPS, 2024).

Tabel 1.1
Rerata Upah (Rp) yang Diterima Pekerja Indonesia Berdasarkan
Tingkat Akhir Pendidikan Dalam (2022)

Nama Data	Nilai
Perguruan tinggi	Rp. 4.620.000
SMK	Rp. 2.960.000
SMA	Rp. 2.870.000
SMP	Rp.2.220.000
SD ke bawah	Rp.1.910.000

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2022, semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi tingkat upah. Namun menurut riset dari *RAND Corporation* menguji nilai sinyal ijazah di pasar tenaga kerja, terutama dalam kaitannya dengan perbedaan penghasilan antara mereka yang lulus dengan skor minimum dan yang gagal dengan skor tipis di ujian akhir sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijazah memiliki nilai sinyal yang relatif kecil dalam hal penghasilan, sehingga hanya memberikan sedikit keunggulan pada lulusan

dalam hal kemampuan yang dihargai di tempat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa ijazah mungkin lebih mengacu pada kredensial formal daripada representasi langsung atas kompetensi atau kecerdasan individu yang lebih dalam (Clark & Martorell, 2014).

Selain tingkat pendidikan, pengalaman kerja juga memiliki pengaruh dalam menentukan upah. Karena pengalaman kerja yang banyak akan mempengaruhi proses adaptasi dengan pekerjaan yang diberikan. Pekerja yang memiliki banyak pengalaman cenderung lebih produktif dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaannya. Karena semakin lama seseorang melakukan pekerjaannya maka akan semakin banyak keterampilan yang dikuasai. Pengalaman kerja dapat memberikan kompensasi berupa upah (Asyhadie, 2007).

Pengalaman kerja seringkali dianggap sebagai salah satu indikator paling signifikan yang mempengaruhi tingkat upah. Karena pekerja yang memiliki pengalaman cenderung lebih efisien dan produktif dalam menyelesaikan tugas. Tetapi ternyata tidak semua hasil penelitian memiliki kesimpulan yang sama, dimana upah dan pengalaman kerja tidak bervariasi diseluruh struktur dalam pengalaman kerja. (Alexander, 1974). Hal ini menunjukkan bahwa topik ini masih bisa diteliti lebih jauh lagi.

Upah tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman kerja, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi upah adalah sertifikat, menurut beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara kepemilikan sertifikat dan besaran upah yang diterima oleh seorang pekerja. sertifikat dianggap sebagai bukti kompetensi dan keahlian seseorang. Dengan memiliki sertifikat, pekerja memiliki daya tawar yang lebih tinggi dalam negosiasi gaji (Nurcholis, 2011).

Di Indonesia tidak banyak penelitian yang meneliti tentang pengaruh sertifikat terhadap upah. Sedangkan di Amerika Serikat topik ini lumayan detail dibahas dalam laporan yang dikeluarkan oleh *Bureau of Labor Statistic (BLS)* pada tahun 2023. Dimana ditemukan bahwa individu yang memiliki sertifikat dengan rentang umur 16 tahun atau lebih, 55 tahun atau lebih dan 65 tahun atau lebih

memiliki upah lebih banyak 31.6% hingga 32.2% daripada individu yang tidak memiliki sertifikat (BLS, 2024).

Isu pendidikan selalu menjadi topik yang menarik untuk diteliti, dimana salah satu tujuan utama seseorang menempuh pendidikan adalah untuk meningkatkan upah. Namun dalam sebuah penelitian memiliki ijazah tanpa keahlian tambahan tidak mengalami peningkatan signifikan dalam penghasilan dibandingkan dengan yang tidak memiliki ijazah tetapi memiliki keahlian tambahan (Clark & Martorell, 2014). Oleh karena itu, peran pendidikan atau ijazah sebagai sinyal untuk mendapatkan upah yang lebih baik, menarik untuk diteliti ditambah dengan faktor lainnya seperti pengalaman kerja dan sertifikat.

Pada tahun 2012 penelitian tentang topik ini pernah dilakukan dengan metode OLS dengan model regresi linear berganda menggunakan data nasional Thailand, sehingga di penelitian kali ini juga menggunakan metode yang sama dengan menggunakan data SAKERNAS tahun 2022 (Wannakrairoj 2013). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah sebagai variabel terikat, Pendidikan sebagai variabel bebas pertama, sertifikat sebagai variabel bebas kedua dan pengalaman kerja sebagai variabel bebas ketiga.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh Pendidikan, sertifikat dan pengalaman kerja terhadap upah di Indonesia. Sehingga peneliti mengkaji lebih mendalam penelitian ini dengan judul : “PERAN TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI SINYAL DALAM MEMPENGARUHI UPAH DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pendidikan memiliki peran dalam mempengaruhi upah di Indonesia?
2. Apakah sertifikat memiliki peran dalam mempengaruhi upah di Indonesia?
3. Bagaimana peran pengalaman kerja dalam mempengaruhi upah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan tentang topik penelitian, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana peran tingkat pendidikan terhadap upah di Indonesia.
2. Untuk mengkaji bagaimana pengaruh sertifikat terhadap upah.
3. Untuk melihat bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap upah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Berfungsi sebagai sumber informasi bagi pemerintah daerah saat mereka membuat kebijakan ketenagakerjaan atau rencana masa depan.
2. Bisa dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya sebagai acuan dengan topik yang sama.
3. Sebagai penambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat.

